

Kegagalan Tata Kelola dan *Elite Capture* pada Dana Desa: Sebuah Meta Sintesis Literatur Akuntansi Sektor Publik

Icha Mustamin^{1*}, Andi Rafiyadi Eka Saputra², Nirwana³, Aini Indrijawati⁴

¹Politeknik Indonesia, Indonesia

²⁻⁴Universitas Hasanudin, Indonesia

*Penulis Korespondensi: ichamustamin@gmail.com

Abstract. *Fiscal decentralization through the Village Fund is idealized as an instrument for economic equality and democratic governance at the grassroots level. However, contemporary public sector accounting literature reveals an anomaly: high levels of administrative compliance do not correlate with substantive accountability. This paper, a Systematic Literature Review (SLR), aims to synthesize previous empirical findings regarding governance failures and the phenomenon of elite capture in Village Fund management in Indonesia. Using a qualitative meta-synthesis approach from leading journal articles, this study finds that the failure of Village Fund governance is caused by three main factors: (1) institutional separation due to the forced adoption of the formal system (SISKEUDES) without cultural readiness; (2) the dominance of a paternalistic culture that inhibits rational participation; and (3) a deficit in citizen political articulation. These findings confirm that without strong political articulation, the formal accounting system will only serve as an instrument of legitimacy for the village oligarchy. The implications of this study call for a paradigm shift in public sector auditing from compliance auditing to liberating social auditing.*

Keywords: *Elite Control; Meta-Synthesis; Political Articulation; Substantive Accountability; Village Funds.*

Abstrak. Desentralisasi fiskal melalui Dana Desa diidealkan sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan tata kelola demokratis di tingkat akar rumput. Namun, literatur akuntansi sektor publik kontemporer menunjukkan sebuah anomali yaitu tingginya kepatuhan administratif pelaporan keuangan tidak selalu berkorelasi dengan akuntabilitas substantif. Artikel ini merupakan studi *Systematic Literature Review* (SLR) yang bertujuan untuk mensintesis temuan-temuan empiris terdahulu mengenai kegagalan tata kelola dan fenomena *elite capture* dalam pengelolaan Dana Desa di Indonesia. Menggunakan protokol pencarian terstruktur pada basis data akademik, kajian kualitatif meta-sintesis ini menemukan bahwa kegagalan tata kelola Dana Desa disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu (1) *institutional decoupling* akibat adopsi sistem formal (SISKEUDES) yang dipaksakan tanpa kesiapan kultural, (2) dominasi budaya paternalistik yang mematikan partisipasi rasional, dan (3) defisit artikulasi politik warga. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa tanpa artikulasi politik yang kuat, sistem akuntansi formal rentan dimanipulasi menjadi instrumen legitimasi bagi oligarki desa. Implikasi studi ini menuntut pergeseran paradigma auditor sektor publik dari sekadar audit kepatuhan (*compliance*) menuju audit sosial yang emansipatoris.

Kata kunci: Akuntabilitas Substantif; Artikulasi Politik; Dana Desa; Kontrol Elite; Meta-Sintesis.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pergeseran paradigma dari *New Public Management* (NPM) ke *New Public Governance* (NPG) telah menempatkan akuntabilitas bukan lagi sekadar instrumen pelaporan vertikal ke atas, melainkan sebagai hak demokratis warga negara (Dillard & Vinnari, 2019). Hal ini sejalan dengan kritik luas bahwa penerapan NPM yang terlampau teknokratis di negara berkembang seringkali gagal mengurai kompleksitas korupsi dan ketimpangan lokal (Hopper et al., 2017). Di Indonesia, manifestasi terbesar dari paradigma ini adalah implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan desentralisasi fiskal secara masif.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pun diterapkan sebagai standarisasi pelaporan agar *auditable* dan transparan.

Namun, telaah kritis terhadap praktik akuntansi sektor publik mengungkapkan sebuah anomali. Tingginya tingkat predikat pelaporan yang baik secara administratif seringkali menyembunyikan realitas *elite capture*, yakni pembajakan sumber daya publik oleh segelintir elit penguasa desa untuk kepentingan jejaring patronasenya (Jayasinghe et al., 2023). Akuntansi, dalam hal ini, terjebak dalam ilusi objektivitas; angka-angka APBDes disusun dengan rapi hanya untuk memenuhi syarat pencairan dana tahap berikutnya (kepatuhan semu), tanpa mencerminkan keadilan alokasi bagi masyarakat marjinal (Prabowo et al., 2024).

Kompleksitas kegagalan tata kelola ini semakin diperparah oleh hegemoni budaya lokal yang seringkali berwatak paternalistik dan hierarkis. Dalam ekosistem pedesaan, akuntansi tidak beroperasi di ruang hampa, melainkan bergesekan langsung dengan struktur kekuasaan sosial tradisional. Transparansi angka di atas kertas tidak akan bermakna tanpa adanya "artikulasi politik" dari warga yakni kapasitas dan keberanian masyarakat sipil untuk mengorganisir diri, menyuarakan kepentingan, dan memberikan sanksi sosial kepada elit desa (Chhatre, 2008). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa budaya *ewuh pakewuh* (rasa sungkan) seringkali mematikan daya kritis warga, sehingga dominasi elit lokal (*local power dynamics*) tetap tak tersentuh meskipun desa telah menerima kucuran dana desentralisasi yang masif (Awio & Northcott, 2023).

Lebih jauh, literatur akuntansi kritis global saat ini tengah menyoroiti bahaya dari "performativitas akuntabilitas" yang kerap melanda reformasi sektor publik di negara-negara berkembang (Alawattage & Azure, 2021). Adopsi sistem pelaporan keuangan yang kaku seringkali hanya diorientasikan untuk memuaskan auditor dan pemerintah supra-desa (*monologic accountability*), namun secara sistematis gagal memfasilitasi dialog sosial yang setara dengan masyarakat marjinal (Kuruppu & Lodhia, 2020). Dalam situasi ini, dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) beralih fungsi dari instrumen evaluasi publik menjadi "fasad pelindung" (*protective facade*) yang menjustifikasi ketimpangan distribusi sumber daya.

Kelemahan mendasar dari akuntabilitas monologis ini adalah hilangnya fungsi emansipatoris dari akuntansi itu sendiri. Seperti yang didalilkan oleh Sargiacomo et al. (2025), audit dan pelaporan sektor publik yang hanya terpaku pada kepatuhan format (*compliance driven*) secara tidak langsung akan menyuburkan eksklusi sosial. Sistem tersebut menuntut warga pedesaan untuk memahami bahasa akuntansi teknokratis yang rumit, sehingga pada

akhirnya partisipasi publik dalam forum seperti Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) tereduksi menjadi sekadar stempel legitimasi belaka.

Meskipun berbagai penelitian individual (studi kasus) telah menyoroti fenomena kegagalan tata kelola ini di berbagai provinsi di Indonesia, mayoritas tinjauan literatur sebelumnya masih berfokus pada kendala teknis dan infrastruktur teknologi informasi dalam penerapan SISKEUDES. Masih sangat terbatas kajian yang mengkonsolidasikan temuan-temuan empiris tersebut melalui lensa sosiologi politik dan akuntansi kritis. Kekosongan literatur (*research gap*) inilah yang menjadi motivasi utama penelitian ini.

Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk memetakan dan mensintesis literatur-literatur terfragmentasi tersebut guna mendapatkan gambaran utuh mengenai anatomi kegagalan tata kelola Dana Desa. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), riset ini diharapkan mampu membongkar tabir *institutional decoupling* dan memberikan arah baru bagi pengembangan standar akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Apa saja pola dan faktor utama yang diidentifikasi oleh literatur terdahulu sebagai penyebab terjadinya *elite capture* dan kegagalan akuntabilitas Dana Desa di Indonesia.? (2) Bagaimana sintesis konseptual dari temuan-temuan empiris tersebut dapat menjelaskan fenomena *institutional decoupling* dalam sistem akuntansi desa.?

Tujuan Penelitian

Artikel ini bertujuan untuk memetakan, menganalisis, dan mensintesis literatur empiris terkait tata kelola Dana Desa guna menemukan akar sosiologis dan politis dari kegagalan akuntabilitas substantif, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan teori dan standar akuntansi sektor publik.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

New Institutional Theory* dan *Institutional Decoupling

Analisis terhadap kegagalan sistem akuntansi sektor publik seringkali menggunakan lensa *New Institutional Theory* (NIT). Teori ini mendalilkan bahwa organisasi cenderung mengadopsi struktur, prosedur, atau sistem pelaporan formal bukan semata-mata demi efisiensi operasional, melainkan untuk memperoleh legitimasi eksternal dari lingkungan institusionalnya (DiMaggio & Powell, 1983). Dalam konteks tata kelola Dana Desa, kewajiban penggunaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan bentuk isomorfisme koersif

(*coercive isomorphism*), di mana pemerintah pusat memaksa desa untuk menyeragamkan format pelaporannya.

Ketika sistem akuntansi formal yang dipaksakan ini berbenturan dengan realitas kapasitas dan politik lokal, organisasi cenderung melakukan *institutional decoupling* (pemisahan institusional), di mana struktur formal hanya diadopsi sebagai mitos dan seremoni belaka untuk menyenangkan pihak eksternal (Meyer & Rowan, 1977). *Decoupling* terjadi ketika aturan yang dilaporkan di atas kertas (*form*) sangat patuh dan rapi, namun praktik kerja nyata di lapangan (*substance*) tetap berjalan berdasarkan norma-norma informal (Prabowo et al., 2024). Akibatnya, laporan keuangan desa hanya berfungsi sebagai "fasad" (etalase) legitimasi untuk memastikan pencairan dana tahap berikutnya, alih-alih sebagai instrumen transparansi yang hakiki.

Elite Capture dan Teori Artikulasi Politik

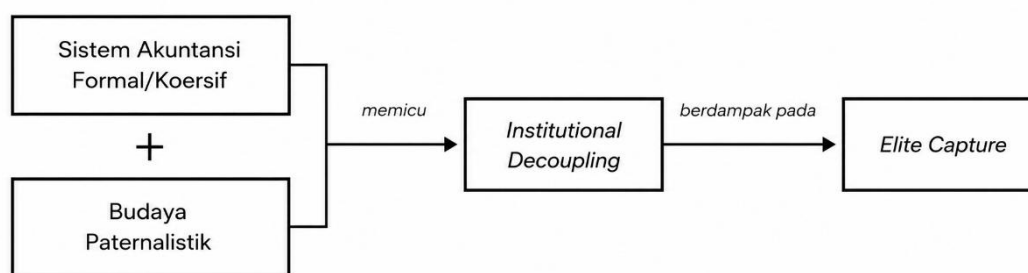
Desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah lokal memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan warganya. Namun, literatur ekonomi politik menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan asimetris, desentralisasi justru memperbesar risiko *elite capture* sebuah fenomena di mana segelintir elit lokal membajak sumber daya publik demi kepentingan jejaring kekerabatan dan patronasenya (Jayasinghe et al., 2023). Untuk menjelaskan mengapa institusi demokrasi lokal gagal mencegah *elite capture*, Chhatre (2008) menawarkan kerangka Teori Artikulasi Politik (*Political Articulation Theory*). Teori ini menegaskan bahwa akuntabilitas tidak lahir secara otomatis dari sekadar adanya desain institusi atau penerapan sistem akuntansi yang canggih. Akuntabilitas substantif hanya dapat terwujud jika terdapat "artikulasi politik", yakni kapasitas kolektif warga masyarakat (terutama kelompok marjinal) untuk berorganisasi, menekan birokrasi, dan menyuarakan tuntutan mereka. Dalam masyarakat dengan budaya paternalistik yang kuat, artikulasi politik ini seringkali terbungkam oleh relasi kuasa yang timpang, sehingga akuntansi dimonopoli oleh elit desa (Awio & Northcott, 2023).

Akuntabilitas Monologis menuju Akuntabilitas Dialogis

Literatur akuntansi kritis kontemporer membedakan antara akuntabilitas administratif (monologis) dan akuntabilitas substantif (dialogis). Akuntabilitas monologis terjadi ketika pelaporan keuangan hanya diorientasikan untuk memuaskan hierarki birokrasi di atasnya (pemerintah supra-desa atau auditor negara) melalui indikator kepatuhan format (Alawattage & Azure, 2021). Model ini seringkali mengabaikan keadilan distributif bagi masyarakat di akar rumput.

Sebagai antitesis, Dillard dan Vinnari (2019) menggagas pendekatan *Critical Dialogic Accountability*. Pendekatan ini menuntut pergeseran fungsi akuntansi dari sekadar alat pelaporan vertikal menjadi medium evaluasi sosial yang kritis dan partisipatif. Dalam konteks Dana Desa, akuntabilitas dialogis mensyaratkan bahwa informasi keuangan harus dapat diakses, dipahami, dan diperdebatkan oleh warga desa (Grossi & Trigo, 2024), sehingga mampu membongkar praktik-praktik *window dressing* yang selama ini melindungi kepentingan elit.

Kerangka Pemikiran Konseptual



Gambar 1. Kerangka Pemikiran.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian ini membangun sebuah kerangka konseptual untuk membedah anomali Dana Desa. Desentralisasi fiskal yang diiringi oleh pemaksaan sistem akuntansi monologis (SISKEUDES) berhadapan dengan rendahnya artikulasi politik warga dan kuatnya budaya paternalistik. Kondisi ini memicu terjadinya *institutional decoupling*, yang pada akhirnya memberikan ruang aman bagi pelanggaran *elite capture*. Kajian meta-sintesis ini diarahkan untuk mengonfirmasi dan memperluas relasi antar konsep tersebut melalui bukti-bukti empiris terdahulu.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *Systematic Literature Review* (SLR) yang dipadukan dengan pendekatan meta-sintesis kualitatif. Secara khusus dalam disiplin ilmu akuntansi, pendekatan SLR sangat direkomendasikan (Massaro et al., 2016) karena kemampuannya dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan secara sistematis berbagai temuan empiris terdahulu yang relevan dengan fenomena *elite capture* pada tata kelola Dana Desa, serta meminimalisir bias subjektivitas peneliti. Lebih lanjut, penggunaan meta-sintesis

kualitatif bertujuan untuk tidak sekadar merangkum literatur secara deskriptif, melainkan mengonstruksi sintesis konseptual baru dari berbagai studi (kualitatif maupun kuantitatif) yang sebelumnya terfragmentasi.

Protokol Pengumpulan Data

Pencarian dan pengumpulan literatur dilakukan secara terstruktur dengan mengadaptasi pedoman PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*). Pencarian data dilakukan melalui tiga basis data akademis utama yang relevan dengan konteks Indonesia, yaitu: *Google Scholar*, SINTA (*Science and Technology Index*), dan Portal Garuda. Rentang waktu publikasi dibatasi selama lima tahun terakhir, yakni antara tahun 2018 hingga 2023, untuk memastikan kemutakhiran data dan relevansinya dengan dinamika implementasi UU Desa terbaru. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci (*Boolean operators*) spesifik sebagai berikut: ("Dana Desa" AND "Elite Capture") OR ("Akuntabilitas" AND "Dana Desa") OR ("Siskeudes" AND "Transparansi").

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Guna meminimalisir bias subjektivitas peneliti dan menjaga kualitas literatur yang disintesis, ditetapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat sebagai batasan kelayakan artikel.

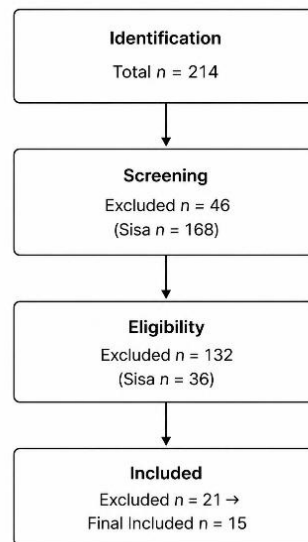
Kriteria Inklusi

Artikel jurnal ilmiah *peer-reviewed* berbahasa Indonesia atau Inggris; (1) Merupakan riset empiris (studi lapangan) yang meneliti fenomena kegagalan akuntabilitas, bias partisipasi, atau dominasi elit dalam penyusunan APBDes di Indonesia; (2) Memiliki metodologi dan temuan yang jelas.

Kriteria Eksklusi

(1) Artikel yang hanya bersifat normatif/tinjauan literatur murni tanpa data lapangan primer; (2) Opini media massa, laporan teknis pemerintah, atau skripsi/tesis yang tidak dipublikasikan di jurnal; (3) Artikel yang berfokus murni pada tutorial teknis aplikasi SISKEUDES tanpa analisis sosiopolitik.

Tahapan Seleksidan Analisis Data



Gambar 2. Tahap Seleksi dan Analisis Data.

Proses seleksi literatur dilakukan dalam empat tahapan secara ketat mengacu pada protokol PRISMA. Pada tahap *Identification*, pencarian awal menggunakan kata kunci pada ketiga basis data menghasilkan 214 artikel. Pada tahap *Screening*, dilakukan eliminasi terhadap 46 artikel yang teridentifikasi ganda (terduplikasi) antar-basis data, sehingga menyisakan 168 artikel.

Selanjutnya, pada tahap *Eligibility*, peneliti melakukan penyaringan awal berdasarkan pembacaan judul dan abstrak, lalu mengeksklusi 132 artikel karena tidak membahas akuntabilitas secara substantif, tidak berfokus pada Dana Desa, atau sekadar membahas tutorial teknis aplikasi SISKEUDES. Dari 36 artikel yang tersisa, kelayakan dinilai lebih mendalam melalui pembacaan naskah utuh (*full-text*). Pada tahap akhir (*Included*) ini, sebanyak 21 artikel kembali dieksklusi karena hanya berupa tinjauan normatif (tanpa data lapangan primer) atau metodologinya tidak valid. Proses penyaringan yang ketat ini pada akhirnya menyisakan 15 artikel jurnal utama empiris yang merepresentasikan berbagai dinamika dan konteks budaya pemerintahan desa dari wilayah Jawa, Sumatera, hingga Indonesia Timur.

Seluruh 15 artikel terpilih tersebut kemudian diekstraksi dan dianalisis menggunakan Analisis Tematik (*Thematic Analysis*). Temuan-temuan empiris dari masing-masing artikel dikodekan (*coding*), dikelompokkan ke dalam tema-tema dominan (seperti *institutional decoupling*, asimetri informasi, dan hegemoni paternalistik), lalu ditarik benang merahnya untuk membangun sebuah sintesis teoretis yang baru guna menjawab rumusan masalah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan Pola Kegagalan Akuntabilitas Dana Desa

Berdasarkan hasil ekstraksi dan meta-sintesis dari 15 literatur empiris utama, penelitian ini menemukan bahwa kegagalan tata kelola Dana Desa bukanlah bersumber dari kelemahan infrastruktur teknologi atau aplikasi SISKEUDES itu sendiri, melainkan bermuara pada orkestrasi sosiopolitik yang sistematis di tingkat lokal. Makalah ini mengidentifikasi tiga pola utama yang secara konsisten menjadi prasyarat terjadinya *elite capture* dan kegagalan akuntabilitas.

Asimetri Informasi dan Monopoli Literasi Akuntansi

Berbagai literatur empiris menunjukkan bahwa dokumen APBDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) seringkali didesain dengan tingkat kompleksitas teknis yang mengalienasi warga biasa. Elit desa (Kepala Desa dan perangkatnya) secara sadar menggunakan kerumitan "bahasa akuntansi" ini untuk memonopoli informasi dan mengeksklusi warga dari ruang pengawasan (Jayasinghe et al., 2023). Transparansi fisik seperti pemasangan baliho APBDes memang dilakukan untuk menggugurkan kewajiban regulasi, namun sifatnya hanyalah komunikasi satu arah (*monologic accountability*) (Alawattage & Azure, 2021). Akibatnya, warga disuguhi angka-angka global yang tampak wajar, namun kehilangan kemampuan teknis untuk melacak kewajaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari setiap proyek yang dibangun.

Defisit Artikulasi Politik dan Ilusi Musrenbangdes

Mensintesis temuan lapangan dengan teori Chhatre (2008), literatur secara konsisten mengonfirmasi bahwa institusi partisipatif formal seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) seringkali kehilangan roh demokrasinya dan berubah menjadi panggung *pseudo-partisipasi* (partisipasi semu). Kehadiran warga dalam forum tersebut tidak merepresentasikan artikulasi politik yang bermakna. Banyak studi kasus membuktikan bahwa prioritas alokasi anggaran sesungguhnya telah ditentukan melalui kesepakatan informal (*deal-making*) oleh segelintir elit di "ruang belakang" sebelum musyawarah resmi dimulai. Lebih parah lagi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang secara konstitusional seharusnya menjadi fungsi pengawasan eksternal dan representasi politik warga, seringkali terkooptasi oleh Kepala Desa akibat kuatnya relasi patronase atau ikatan kekerabatan lokal.

Hegemoni Budaya Paternalistik (Ewuh Pakewuh)

Riset sosial lintas disiplin menegaskan bahwa budaya masyarakat sangat menentukan efektivitas perilaku penganggaran (Goddard, 1997). Di Indonesia, literatur secara seragam

melaporkan bahwa budaya *power distance* (jarak kekuasaan) yang tinggi serta nilai-nilai paternalistic seperti rasa *ewuh pakewuh* (sungkan/segan) di Jawa atau budaya penghormatan hierarkis di wilayah lain—secara efektif mematikan mekanisme *whistleblowing* di tingkat akar rumput. Meskipun masyarakat secara kasat mata melihat adanya *mark-up* atau proyek fiktif yang menguntungkan keluarga Kepala Desa, mereka memilih diam untuk menghindari konfrontasi dan konflik sosial horizontal. Dinamika kekuasaan lokal (*local power dynamics*) ini membuktikan bahwa sistem akuntansi rasional akan selalu gagal bekerja di tengah budaya yang menghindari konfrontasi tanpa adanya organisasi akar rumput yang kuat (Awio & Northcott, 2023).

Sintesis: *Institutional Decoupling* sebagai *Bumper Elit*

Secara konseptual, meta-sintesis dari ketiga pola di atas membuktikan terjadinya fenomena *institutional decoupling* yang masif di tingkat desa (Prabowo et al., 2024). Pemerintah pusat memaksakan instrumen *New Public Management* (NPM) yang rasional dan kaku melalui SISKEUDES (*coercive isomorphism*), sementara realitas operasional desa berputar menggunakan logika sosiologis yang tradisional dan patron-klien (DiMaggio & Powell, 1983).

Akibatnya, terjadi pemisahan (*decoupling*) antara dokumen pelaporan dan realitas di lapangan. Akuntansi desa disusun sangat rapi semata-mata untuk mereproduksi legitimasi administratif—sebagai "tiket" agar dana tahap berikutnya dapat dicairkan oleh Kementerian Keuangan—tetapi gagal secara fundamental dalam menciptakan distribusi kesejahteraan yang berkeadilan. Pada titik inilah, sistem akuntansi beralih fungsi dari instrumen akuntabilitas publik menjadi *bumper* pelindung (tameng teknokratis) yang justru melanggengkan kekuasaan oligarki desa.

5. KESIMPULAN

Melalui tinjauan sistematis dan meta-sintesis terhadap berbagai literatur empiris, studi ini menyimpulkan bahwa kegagalan tata kelola dan maraknya *elite capture* pada Dana Desa di Indonesia bukanlah diakibatkan oleh kelemahan teknis dari Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Kegagalan tersebut berakar pada realitas sosiopolitik yang lebih fundamental: defisit artikulasi politik warga, kuatnya hegemoni budaya paternalistik, dan asimetri informasi yang secara sistematis dipelihara oleh elit lokal.

Lebih jauh, studi ini membuktikan terjadinya fenomena *institutional decoupling* di tingkat akar rumput. Tingginya kepatuhan perangkat desa terhadap standar pelaporan akuntansi saat ini mayoritas hanyalah kepatuhan administratif (kepatuhan semu) yang berorientasi pada

pencairan dana. Alih-alih menjadi alat emansipasi masyarakat, akuntansi justru direduksi menjadi "tameng teknokratis" yang menutupi ketidakadilan distributif dan melanggengkan kekuasaan oligarki desa di balik rapinya angka-angka APBDes.

Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi Teoritis

Studi ini memberikan kontribusi pada literatur Akuntansi Sektor Publik Kritis (*Critical Public Sector Accounting*) dengan mengafirmasi bahwa desain sistem akuntansi dan pengendalian internal tidak dapat lagi menggunakan pendekatan *one-size-fits-all* ala *New Public Management* (NPM). Studi ini memperkuat Teori Artikulasi Politik dengan membuktikan bahwa tanpa adanya kapasitas organisasi masyarakat sipil yang menekan dari bawah (*bottom-up*), sistem transparansi secanggih apa pun akan selalu rentan dikooptasi oleh dinamika kekuasaan lokal.

Implikasi Praktis

Rekomendasi strategis ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan Kementerian Desa. Paradigma pengawasan harus segera digeser dari sekadar "Audit Kepatuhan" (*compliance audit*) yang monologis menuju pendekatan "Audit Sosial" yang emansipatoris. BPK dan APIP perlu mengintegrasikan pelaporan masyarakat (sebagai instrumen *whistleblowing*) dan memvalidasi keadilan alokasi anggaran secara dialogis bersama kelompok marjinal di desa, bukan hanya memeriksa kelengkapan stempel dan kuitansi di atas meja.

Keterbatasan dan Saran Riset Mendatang

Terlepas dari kontribusi yang diberikan, studi meta-sintesis ini memiliki beberapa keterbatasan. *Pertama*, pencarian literatur hanya dibatasi pada tiga basis data akademik utama (SINTA, Garuda, Google Scholar) dalam rentang waktu lima tahun terakhir, sehingga berpotensi mengeksklusi *grey literature* (seperti laporan investigasi LSM atau dokumen kebijakan) yang mungkin memiliki data lapangan yang kaya. *Kedua*, kajian ini bergantung pada interpretasi sekunder dari temuan-temuan peneliti sebelumnya.

Untuk riset mendatang, disarankan agar peneliti melakukan studi empiris primer menggunakan pendekatan Etnografi Kritis atau Studi Kasus Instrumental guna mengamati secara langsung proses *deal-making* (negosiasi informal) elit desa di "ruang belakang" sebelum Musrenbangdes. Selain itu, riset kuantitatif yang mengukur korelasi antara efektivitas BPD, tingkat literasi keuangan warga, dan penurunan temuan audit di desa akan sangat bernilai untuk memperluas literatur tata kelola sektor publik di negara berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawattage, C., & Azure, J. D. C. (2021). Behind the World Bank's ringing declarations of "social accountability": Ghana's public financial management reform. *Critical Perspectives on Accounting*, 78, 102242.
- Awio, G., & Northcott, D. (2023). Bottom-up accountability and local power dynamics: The role of community-based organizations. *Financial Accountability & Management*, 39(1), 54–75.
- Chhatre, A. (2008). Political articulation and accountability in decentralization: Theory and evidence from India. *Conservation and Society*, 6(1), 12–23.
- Dillard, J., & Vinnari, E. (2019). Critical dialogical accountability: From accounting-based accountability to accountability-based accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 62, 16–38.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Goddard, A. (1997). Organizational culture and budget related behavior: A comparative contingency study of three local government organizations. *The International Journal of Accounting*, 32(1), 79–97.
- Grossi, G., & Trigo, A. (2024). Social media, digital platforms, and dialogic accountability in local governments: A critical review. *Public Money & Management*, 44(2), 112–120.
- Hopper, T., Lassou, P., & Soobaroyen, T. (2017). Globalisation, accounting and developing countries. *Critical Perspectives on Accounting*, 43, 125–148.
- Jayasinghe, K., Adhikari, P., Carmona, S., & Sopanah, A. (2023). Accounting for 'elite capture' and grassroots accountability: Evidence from decentralized governance. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 36(2), 415–443.
- Kuruppu, C., & Lodhia, S. (2020). Shaping accountability at the grassroots: The case of a non-governmental organisation in a developing country. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 33(4), 845–873.
- Massaro, M., Dumay, J., & Guthrie, J. (2016). On the shoulders of giants: Undertaking a structured literature review in accounting. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(5), 767–801.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Prabowo, A., Suryono, B., & Wicaksono, G. (2024). The illusion of compliance: Institutional decoupling in Indonesian village fund reporting. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(1), 88–112.
- Sargiacomo, M., Corazza, L., & D'Andreamatteo, A. (2025). Reimagining public sector audit: From compliance to social emancipation in local governance. *Critical Perspectives on Accounting*, 95, 102501.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.